

**PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah  
di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
M. FERDINAN PUTRA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRACT**

### **CIVIL SOCIETY ROLE IN WASTE MANAGEMENT (Study of Bentala Partner NGOs in the Waste Bank Program in the Kota Karang Sub District Bandarlampung)**

**By  
M. FERDINAN PUTRA**

*In accordance with the vision and mission of the NGO, Mitra Bentala took part, and assisted the government in efforts to reduce the volume of waste and increase public awareness of the importance of not littering and being able to use it to be a source of income for local residents. The purpose of the study was to analyze the role of civil society in waste management at the Bentala Mitra NGO in the Waste Bank Program in Bandarlampung City. This type of research is a type of descriptive qualitative research. The results showed that the NGO Mitra Bentala had collected and disseminated information about the environment, especially regarding the Waste Bank program that was used to overcome the problem of waste in Bandarlampung City, which had been carried out optimally. Bentala Mitra NGOs have carried out maximum consultations on the development of environmental policies in the form of garbage banks. This has been carried out by various parties, especially from the city government through the UPT TPA Bakung and NGOs. . The implementation of policies undertaken by Bentala NGO NGOs and other environmental NGOs is a form of cooperation between NGOs. Advocacy for environmental justice is quite good, where environmental advocacy is carried out to assist the community in complaining about environmental problems that are already polluted. It is recommended to the Bandarlampung City government and NGO Mitra Bentala to get more leverage in socializing the Waste Bank program which so far has only focused on 3 locations, namely Kota Karang Village, Panjang Village and Batu Putu Village, so that the public will know more about the garbage bank and will be more concerned with environmental conditions by sorting waste that can be recycled into materials that can be useful and have economic value and can reduce the problem of waste in the city of Bandarlampung.*

**Keywords: Role, Civil Society, Waste Management, NGO**

## ABSTRAK

### **PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung)**

Oleh  
**M. FERDINAN PUTRA**

Sesuai visi dan misi LSM Mitra Bentala ikut andil, serta membantu pemerintah dalam upaya mengurangi volume sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan dan dapat memanfaatkan sampah tersebut untuk menjadi penghasilan bagi warga setempat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran *civil society* dalam pengelolaan sampah pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kota Bandarlampung. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan LSM Mitra Bentala telah melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi tentang lingkungan terutama mengenai program Bank Sampah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Bandarlampung telah dilakukan secara maksimal. LSM Mitra Bentala telah melakukan secara maksimal konsultasi pengembangan kebijakan lingkungan berupa bank sampah ini telah dilakukan oleh berbagai pihak khususnya dari pemerintah kota melalui UPT TPA Bakung dan LSM Mitra Bentala selaku lembaga di luar pemerintahan dengan cara melakukan diskusi dan hasil diskusi tersebut dilaksanakan dalam program bank sampah. Implementasi kebijakan yang dilakukan LSM Mitra Bentala dengan NGO bidang lingkungan lainnya merupakan salah satu bentuk kerjasama antar LSM. Advokasi untuk keadilan lingkungan cukup baik, dimana Advokasi lingkungan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengadukan permasalahan lingkungan di sekitarnya yang memang sudah tercemar. Disarankan kepada pemerintah Kota Bandarlampung dan LSM Mitra Bentala untuk lebih maksimal dalam mensosialisasikan program Bank Sampah yang selama ini hanya terfokus pada 3 tempat yaitu Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Panjang dan Kelurahan Batu Putu, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui mengenai bank sampah dan akan lebih peduli dengan kondisi lingkungan hidup dengan cara memilah-milah sampah yang dapat didaur ulang menjadi bahan yang dapat berguna dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Bandarlampung.

**Kata Kunci:** Peran *Civil Society*, Pengelolaan Sampah, NGO

**PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah  
di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung)**

Oleh  
**M. FERDINAN PUTRA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERAN CIVIL SOCIETY DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI PADA LSM MITRA BENTALA DALAM PROGRAM BANG SAMPAH DI KELURAHAN KOTA KARANG BANDARLAMPUNG)**

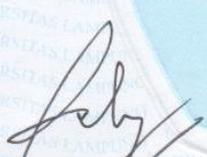
Nama Mahasiswa : **M. FERDINAN PUTRA**

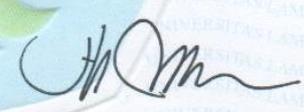
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041110

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

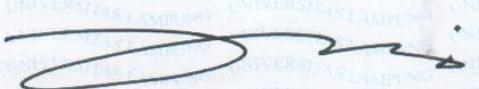
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
**Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19710122199512 2 001

  
**Ita Prihantika, S.Sos., M.A**  
NIP 19840630 201504 2 002

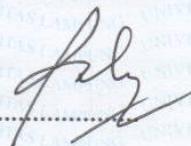
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

  
**Dr. Noverman Duadji, M.Si.**  
NIP 19691103 200112 1 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

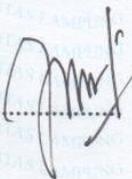
**Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.....**



**Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.....**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Yulianto, M.S.....**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP 19590803 198603 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Desember 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 November 2019  
Yang membuat pernyataan,



M Ferdinan Putra  
NPM : 1516041110

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M Ferdinan Putra, lahir di Bandarlampung, pada tanggal 9 Juli 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Iwan Putra Jaya dan Ibu Yusneni. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak - Kanak Aisyah pada tahun 2001 – 2002. Kemudian Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Talang Bandarlampung pada tahun 2002-2008. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Bandarlampung, pada tahun 2008-2011. Selanjutnya, penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bandarlampung pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada saat itu juga penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA).

## MOTTO

*Ada dua nikmat yang manusia sering dilalaikan (rugi) di dalamnya yaitu sehat dan waktu luang (kesempatan)."*

**(HR. Al-Bukhari dan Ahmad)**

*"Rahasia untuk maju adalah memulai "*

**(Mark Twain)**

*"Anda harus memiliki target sebelum anda melakukan sesuatu"*

**(M Ferdinan Putra)**

*"Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang lain dan diri sendiri"*

**(M Ferdinan Putra)**

## *PERSEMBAHAN*

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala, Tuhan yang telah memberikan kesempatan berharga sehingga dapat terselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

persembahkan karya ini kepada:

*Ayahanda tercinta Iwan Putra Jaya dan Ibunda tercinta Yusneni*

Yang selalu mencintai, mengasihi, menyayangi, mendoakan kebaikanku, mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kebaikan anak-anaknya Aku dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Kakak-Adikku tersayang *Nia Novita sari, Nina Juwita sari dan Nita Yolanda* yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku

Para pendidik Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah jauh lebih baik ke depan, serta almamater tercinta

*UNIVERSITAS LAMPUNG*

## SANWACANA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alikumwarrahmatullahiwabarakatuh*

*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran *Civil Society* Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung)”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang baik dan bukan saja menjadi pembimbing tetapi juga sebagai ibu yang berada di kampus yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran serta masukan dengan sabar kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing kedua yang baik dan sabar yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan dan saran serta masukan dengan sabar kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang baik serta memberikan perhatiannya kepada penulis.
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan proses akademik.
5. Orang tuaku tercinta, anakmu ini mencoba memberikan yang terbaik untukmu. Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga padaku. Betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku. Terimakasih atas dukungan moral maupun materil untukku selama ini kepada penulis. Papaku yang kubanggakan Iwan Putra Jaya, Papa yang selalu menjadi sumber inspirasiku, makasih ya Pah buat pelajaran kesabaran yang sangat luar biasa, Papa yang selalu berkorban segala sesuatunya kepada keluarga terlebih kepada penulis, dan mendukung harapan serta keinginan anak-anaknya. Mamaku tersayang Yusneni, sosok wanita hebat yang senantiasa berdoa bagi kesuksesan disetiap langkah anak-anaknya, yang selalu tiada henti mencurahkan kasih dan sayangnya kepada keluarga. Makasih ya Mah buat pelajaran keikhlasannya selama ini. Terima kasih ya Allah karena telah memberikan kedua orang tua yang hebat dan sangat luar biasa dalam hidupku.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua yang sangat kusayangi. Aamiin.

6. Kakak dan Adikku tersayang Nia Novita Sari, Nina Juwita Sari, Nita Yolanda. Kehadiran kalian menyempurnakan hidupku. Maaf kalo penulis tidak bisa menjadi adik dan kakak yang baik bagi kalian. Semoga kedepannya kita bisa berhasil dan tetap menjadi kebanggaan mama dan papa.
7. Keluarga besar Masri Said dan Rusli tersayang. Sepupu-sepupuku, uni cipi, uni uti, uni meliza, uni eka, denti masri, aci masri, agung masri, dan yang lainnya yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Dr Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
10. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA, Bu Intan Bu Meli, Bu Novita, Pak Noverman, Bu Devi, Pak Bambang, Bu Dewi, Pak Simon, Pak Syamsul, Pak Fery, Pak Eko dan Bu Dian.. Terima kasih atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis ke depannya.
11. Mba Wulan dan Bapak Jo sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan yang baik bagi penulis dan administrasi di jurusan.

12. Pihak-pihak informan yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data kepada penulis serta seluruh pihak informan yang telah memberikan izin penelitian serta memberikan informasi, masukan, dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Untuk sahabat-sahabatku Debby Utami, Atan, Iyan, Reza, Rohani, Ajeng, Tiwi, Rini, Dita terimakasih karena selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu direpotkan oleh penulis untuk menemani dan membantu selama proses bimbingan skripsi ini hingga selesai. Dan juga terimakasih kalian sudah menjadi sahabat yang baik dan selalu membantu penulis selama di kampus dan di luar kampus. Semoga persahabatan kita akan selalu baik sampai kita mencapai kesuksesan kelak.
14. Untuk teman-teman “ATLANTIK” Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015. Rizki selaku ketua angkatan yang penuh dengan drama, Kadek, Andi, Jeki, Hanif, Suryo, Ijal, Rifky, Aldino, Bayu, Dwiyan, Kenda, Riswan, Rahmat, Yuan, Dedi, Cindy, Meika, Ana, Maul, Tala, Ades, Cory, Lidya, Fitri Kecil, Ambar, Muslimah, Anggita, Nurma, Putri Rahayu, Mahda, Intan, Memeng, Melani, Indah, Elva, Lia, Farida, Ogi, Nafi, Anisa, Oca, Desi, Irma, Gita, Realita, Tina, Rizka, Wiwik, Sonia, Ilul, Sinta, Ade Rahma, Bestha, Dinda, Luli, Putri, Ula, Karina, Nila, Desta, Bima, Panjul, Basri, Mashal, Gilang, Panji, Nandita, Galuh, Soma, Rony, Vera, Seski, Onisa, Hastin, Ari, Bobi, Rani, Rika Ria, Angel dan teman-teman yang lain nya semoga kita semua menjadi orang yang sukses suatu saat nanti.
15. Untuk senior-seniorku yang banyak membantu peneliti, baik saat kuliah maupun saat menunggu dosen pembimbing, Heni, Yunia Mertisanfara, Mba

Tj, Fatra Don, Andra, Ferry, Binter, Faiz, Holil, Fajri, Taufik, Bang Leo, Bang Pindo, Bang Dimas, Bang Zikri, Mba Rindu, Mba Uun dan yang lain nya yang selalu memberi nasihat dan pengetahuan kepada penulis.

16. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penelitian dan yang telah menemani penulis selama kuliah di UNILA yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 17 Desember 2019  
Penulis

M Ferdinan Putra

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Tinjauan Tentang Organisasi Publik.....	10
C. Tinjauan Tentang <i>Good Governance</i> .....	12
D. Tinjauan Tentang Masyarakat Sipil ( <i>Civil Society</i> ) dan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	18
E. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Fokus Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Teknik Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	43
1. Sejarah Singkat LSM Mitra Bentala .....	43
2. Profil LSM Mitra Bentala .....	44
3. Kepengurusan di LSM Mitra Bentala .....	44

4. Visi, Misi dan Tujuan LSM Mitra Bentala .....	45
5. Kapasitas Lembaga .....	46
6. Program Manager LSM Mitra Bentala .....	46
7. Jaringan Kerjasama LSM Mitra Bentala.....	48
8. Pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang	50
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	52
1. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi tentang Lingkungan	52
2. Konsultasi Pengembangan Kebijakan Lingkungan .....	64
3. Implementasi Kebijakan Lingkungan .....	69
4. Advokasi untuk Keadilan Lingkungan.....	73

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu .....	9
2. Informan Penelitian.....	36
3. Program Kerjasama LSM Mitra Bentala Bandarlampung (1997-2019) ....	49
4. Data Sampah Kota Bandar Lampung yang Masuk ke UPT TPA Bakung.	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	34
2. Struktur Organisasi Kepengurusan di LSM Mitra Bentala Bandarlampung	45
3. Kegiatan Sosialisasi oleh LSM Mitra Bentala Tentang Bank Sampah.....	56
4. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengelola sampah dan bank sampah oleh LSM Mitra Bentala dan BEM Unila Tanggal 19 Juli 2019 .....	57
5. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah Bagi Petugas Sokli, Masyarakat, Ibu-ibu PKK di Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandarlampung Tanggal 13 November 2019 .....	57
6. Penyebaran Informasi Tentang Bank Sampah oleh LSM Mitra Bentala Bandarlampung melalui <i>Facebook</i> .....	59
7. Penyebaran Informasi Bank Sampah oleh LSM Mitra Bentala Bandarlampung melalui <i>Facebook</i> .....	60
8. Dokumentasi Penyebaran Informasi Bank Sampah Melalui Poster di LSM Mitra Bentala Bandarlampung.....	61
9. Dokumentasi Kondisi Sampah di Salah Satu Sudut Kota Bandarlampung	61
10. Pendampingan LSM Mitra Bentala Bandarlampung Terhadap Masyarakat Ke Pemerintah Kota Bandarlampung .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan reformasi dan otonomi pada saat ini sangatlah memerlukan kerja sama antara Pemerintah maupun masyarakat untuk suatu kegiatan yang bersifat aman, tentram dan juga teratur sesuai dengan aturan yang berlaku (Sujiatmi, 2017). Pemerintah harus melibatkan semua obyek-obyek vital untuk menjamin proses desentralisasi secara baik dan bertanggung jawab di mana mereka sebagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan. Untuk itu diperlukan keterlibatan baik dari organisasi publik yang dimiliki pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

*Governance* adalah tata cara pemerintah yang digunakan dalam rangka mengatur dan mengelola sumber daya sosial, ekonomi guna mengembangkan pembangunan bagi masyarakat. Konsep *governance* merupakan konsep yang diperkenalkan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep *good governance* yang pertama kali diperkenalkan oleh World Bank, bahwa *governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mulyadi, 2015). Tujuan *good governance* menurut Kurniawan (2005) adalah

mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Maka dari itu tujuan *good governance* tercapai di suatu negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan *good governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang melanda suatu negara untuk bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik di antaranya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh internal sendiri. Maka dari itu untuk mencapai tujuan *good governance*, pemerintah maupun masyarakat sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan *good governance* di Indonesia tidak serta merta menjadi *problem solving* dalam segala masalah sosial yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan *Central Intelligence Agency* (CIA) *World Factbook* Tahun 2013, Indonesia merupakan urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 253.609.643 jiwa atau sebesar 4% dari total jumlah penduduk dunia. Persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar di hampir seluruh wilayah perkotaan adalah masalah sampah (Sujiatmi, 2017).

Hingga saat ini kekuatan *civil society* yang mandiri dapat bekerja lintas kelas dan maupun menjadi ‘pengerem’ tendensi intervensionis yang dilakukan negara (Cohen dalam Hikam, 1996). Untuk itu, keberhasilan *good governance*

tidak terlepas dari dari peranan LSM/*civil society*. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut konsep *civil society* karakteristik LSM yang bercirikan: mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, dipandang dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran.

Hal ini sejalan dengan konsep *good governance*, yang mana dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (pemerintah). Tetapi lebih menggambarkan adanya pola kerjasama yang baik antar elemen yang ada yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah bila melaksanakan pembangunan secara sepihak, oleh karena itu diperlukan peran pihak swasta dan masyarakat untuk mendukungnya yang salah satunya adalah organisasi Mitra Bentala.

Mitra Bentala merupakan salah satu LSM/*Civil society* yang ada di Lampung dan tujuan LSM Mitra Bentala adalah mengurangi pengerusakan dan rusaknya ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (mangrove, lamun, terumbu karang), mendorong adanya pengelolaan sumber daya alam pesisir-laut dan

pulau-pulau kecil Lampung yang terpadu dan berkelanjutan dan mendorong dan meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir-laut.

Hasil pra-riset pada Tanggal 14 September 2018 menemukan permasalahan yang ada di Kota Bandarlampung adalah tidak semua sampah terangkut ke tempat pembuangan yang disebabkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah tidak sesuai dengan tempat dan waktu pembuangan sampah. Sebagai sampah yang tidak terangkut petugas oleh masyarakat ada yang dibuang dengan cara ditimbun, dibuang ke laut atau sungai, dibakar dan berbagai cara lainnya. Selain itu tidak adanya peraturan hukum yang tegas membuat masyarakat tidak peduli dengan sampah dan mereka masih terus melakukan pembuangan sampah secara sembarangan sehingga akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan. Meningkatnya volume sampah di Bandarlampung secara signifikan dan terbilang sangat besar yaitu sebesar 840 ton per hari, maka perlu adanya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien agar timbunan sampah yang ada di Bandarlampung tidak semakin menumpuk setiap harinya. Melihat kondisi tersebut masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup terutama Mitra Bentala membuat sebuah program di Bandarlampung yaitu Bank Sampah. Bank Sampah seperti yang dikenal sebutannya di Indonesia merupakan sebuah konsep pengelolaan sampah yang meyakinkan, sebagai program strategis yang baru. Pengelolaan sampah dengan dampak positif melalui program pengembangan Bank Sampah tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Bank Sampah pada umumnya dibentuk dilingkungan penghuni 1.000 orang dan biasanya dijalankan oleh warga kurang mampu yang ingin

meningkatkan pendapatannya. Transaksi dicatat di buku tabungan yang dipegang oleh nasabah atau alternatifnya dicatat pada buku yang disimpan oleh bank sampah. Banyak bank sampah juga yang menerima sampah organik sementara yang lainnya mendorong pengomposan rumah tangga. Bank sampah menjual barang-barang yang ditabung kepada pengepul untuk dipergunakan kembali atau didaur ulang.

Program bank sampah ini juga termasuk ke dalam misi dari Mitra Bentala yaitu, “mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir laut dan pulau-pulau kecil Lampung melalui pelibatan publik dalam mendukung pengelolaan secara demokratis, adil dan berkelanjutan sesuai yang diamanatkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 di mana Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini melalui kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat.

Mitra Bentala memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Bank Sampah dan mengajarkan masyarakat dalam mendaur ulang sampah tersebut. Walikota Bandarlampung Bapak Herman HN memberikan apresiasi kepada LSM yang sudah memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberi solusi bagi Pemerintah kota untuk mengatasi permasalahan tentang sampah, salah satunya melalui program bank sampah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menyatakan kegiatan bank sampah meliputi *reduce*, *reuse* dan *recycle* sampah.

Bentuk keterlibatan *civil society* dapat dilihat dari banyaknya organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-government organizations*) atau dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membantu memberikan masukan penyelesaian permasalahan publik yang ada di masyarakat kepada pemerintah. Peranan *civil society* dalam pemerintahan global semakin meningkat signifikan, tetapi tidak seperti sebelumnya. Tingkat terbaru dari perkembangan organisasi non pemerintah, bagaimanapun adalah suatu hal yang penting. Karena peran penting mereka dalam pemberian layanan dan implementasi, *civil society* telah diakui sebagai mitra dari sistem PBB, terutama pada negosiasi lingkungan (Rosyada dan Gemmil, 2015).

Keberadaan LSM Mitra Bentala merupakan wujud dari kepedulian dan kontribusi dari banyaknya permasalahan yang dialami masyarakat di sekitar wilayah Bandarlampung, sesuai visi dan misi LSM Mitra Bentala ikut berperan dalam membantu pemerintah dalam upaya mengurangi volume sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan dan dapat memanfaatkan sampah tersebut untuk menjadi penghasilan bagi warga setempat (Hasil wawancara Prariset, 14 September 2018).

Keberadaan LSM sebagai wujud dari kepedulian dan kontribusi atas permasalahan di masyarakat sesuai dengan hasil penelitian Melyanti (2014) mengenai pola kemitraan pemerintah, *civil society* dan swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah, *civil society* dan swasta tergolong

dalam jenis pola kemitraan mutualistik. Untuk peran pemerintah, *civil society* dan swasta secara umum bersama merencanakan dan melaksanakan. Secara khusus pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Sedangkan untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan *civil society* sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah.

Hasil penelitian Haswindy (2017) mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman di Kecamatan Tungkil Ilir adalah tingkat pendidikan, pendapatan, luas halaman, keadaan lingkungan, sikap terhadap lingkungan dan persepsi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Peran *civil society* dalam pengelolaan sampah (Studi pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *civil society* dalam pengelolaan sampah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran *civil society* dalam pengelolaan sampah

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama, umumnya tentang pemerintahan lingkungan, khususnya mengenai *civil society* dan permasalahan lingkungan hidup.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa *civil society*, yang dalam hal ini adalah LSM Mitra Bentala Bandarlampung, berperan sebagai aktor non-negara dan ruang publik dalam kelola tata lingkungan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian seperti teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan, dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Penelitian terdahulu dicantumkan untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

<b>Peneliti (tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Melyanti (2014)	Pola kemitraan pemerintah, <i>civil society</i> dan swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo	Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah, <i>civil society</i> dan swasta tergolong dalam jenis pola kemitraan mutualistik. Untuk peran pemerintah, <i>civil society</i> dan swasta secara umum mereka bersama-sama merencanakan dan melaksanakan. Secara khusus pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Sedangkan untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan <i>civil society</i> sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah.

<b>Peneliti (tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Haswindy (2017)	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi yang dilakukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman di Kecamatan Tungkal Ilir adalah tingkat pendidikan, pendapatan, luas halaman, keadaan lingkungan, sikap terhadap lingkungan dan persepsi masyarakat.

Sumber: Melyanti (2014) dan Haswindy (2017)

Berdasarkan Tabel 2.1 maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Melyanti (2014) dan Haswindy (2017) adalah subjek dan objek penelitian. Penelitian Melyanti (2014) membahas mengenai Pola kemitraan pemerintah, *civil society* dan swasta dalam Program Bank Sampah dan Haswindy (2017) mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai peran *civil society* dalam pengelolaan sampah.

## **B. Tinjauan Tentang Organisasi Publik**

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelaahan peneliti atas penjelasan Mahmudi (2011) dapat terlihat bahwa Mahmudi memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun (2006) menjelaskan bahwa organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi *non profit* dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu sangatlah beragam, selain memahami orientasi definisi maupun fokusnya juga berbeda-beda. Organisasi sering dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, Gemmil dan Rosyada (2011) menyatakan bahwa organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua individu atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama.

Selain itu, Gemmil dan Rosyada (2011) menjelaskan definisi organisasi dengan mengklasifikasikan definisi organisasi menjadi tiga, yaitu:

- a. Organisasi dipandang sebagai kumpulan orang
- b. Organisasi dipandang sebagai proses pembagian kerja
- c. Organisasi dipandang sebagai sistem.

Berdasarkan beberapa definisi organisasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi untuk melakukan, kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Gemmil dan Rosyada (2011) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelaahan peneliti atas penjelasan Gemmil dan Rosyada (2011) dalam memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Gemmil dan Rosyada (2011) menjelaskan bahwa organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi non pemerintah dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah.

## **C. Tinjauan Tentang *Good Governance***

### **1. Pengertian *Good Governance***

Padanan kata *governance* dalam Bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti pemerintahan, pengelolaan (Billah, 2001). Dasar kata penadbiran adalah tadbir, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) berarti perihal mengurus atau mengatur (memimpin/mengelola),

pemerintahan dan administrasi. Sedangkan penadbir berarti pengurus atau pengelola. Kata *government* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian sama maknanya dengan penadbir (Sedarmayanti, 2009).

*Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009).

Istilah *governance* menurut Gemmil dan Rosyada (2011), dijelaskan bahwa *governance* sebelumnya telah lama dikenal dalam literatur administrasi dan politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi saja, pemerintahan atau dalam bahasa Inggris disebut *governance* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan, tindakan atau aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman 1993 dalam Gemmil dan Rosyada (2011), bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Melihat pada beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *governance* merupakan konsep tata pemerintahan yang baik

dalam penyelenggaraan penggunaan kekuasaan untuk mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggungjawab melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pada perkembangannya konsep pemerintah terus mengalami perubahan dan penyempurnaan, salah satunya adalah dengan adanya konsep *governance* dengan mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat. Melihat pada beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *governance* merupakan konsep tata pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan penguasaan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggungjawab melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah dan merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata pelaksanaan kebijakan yang hal ini adalah keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat.

## **2. Prinsip-Prinsip *Good Governance***

*Good Governance* menurut UNDP dalam Mustopadidjaja (2012) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu:

- a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
- b. Komunikasi, terdiri dari system jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- c. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek ke pemerintahan yang baik.
- d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni dan kerja sama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
- e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar dan masyarakat madani.

Lima karakteristik dalam *good governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholders* dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2009) mengungkapkan prinsip-prinsip *good governance* antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan,

supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien dan berdaya saing.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009:289).

Menurut Gemmil dan Rosyada (2011), prinsip *governance* meliputi sebagai berikut:

a. Peranan Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Peranan menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk secara konstruktif.

b. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan dibelakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya yang menyangkut hak asasi manusia.

c. Transparansi

Trasnparansi dibangun atas dasar infomasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus memadai agar dimengerti dan dipantau.

d. Peduli pada *Stakeholder*

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkementingan.

e. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintah yang baik menjembati kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangun nya suatu consesnsus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f. Kesenjangan

Semua warga mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesehjataraan mereka.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lelabaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkementingan.

i. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan

perkembangan tersebut. Selain itu dalam penerapan mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar presfektif tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip-prinsip *good governance* adalah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi dan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

#### **D. Tinjauan Tentang Masyarakat Sipil (*Civil Society*) dan Lembaga Swadaya Masyarakat**

##### **1. Pengertian Masyarakat Sipil (*Civil Society*)**

Konsep masyarakat madani, tidak terlepas dengan konsep *civil society*. Karena masyarakat madani merupakan salah satu istilah dari penerjemahan konsep *civil society*. Seperti apa yang dikatakan AS Culla (2012).

Istilah masyarakat madani sebenarnya hanya salah satu diantara beberapa istilah yang seringkali digunakan orang dalam penerjemahan *civil society*. Disamping masyarakat madani, padanan kata yang lain yang sering digunakan adalah masyarakat warga/kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.

Konsep *civil society* sendiri berasal dari peradaban masyarakat barat inti dari konsep ini adalah penolakan terhadap *otoritarianisme* dan *totalitarianisme*. Konsep *Civil society* pertama kali diperkenalkan oleh seorang orator, politisi dan filosof Roma yaitu Cicero yang berasal dari bahasa Latin yaitu *societas civilis* yang pada masa itu masih disamakan

dengan negara (*the state*) yang merupakan sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain.

Sekitar abad 15 sampai dengan abad 17 banyak ahli yang mencoba untuk menggagas konsep dari *civil society* seperti Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. John Locke dengan konsep Masyarakat politik (*political society*). Kemudian dilanjutkan dengan JJ. Rousseau dengan teori kontrak sosialnya (Aniq, 2008)

Pada abad 18 konsep mengenai *civil society* berkembang dengan pesat. Pada masa ini para ahli mulai mencoba membedakan antara masyarakat sipil dan negara. AS Culla (2012) dalam Adam Ferguson dan Thomas Paine lebih memberi penekanan terhadap makna dari *civil society* di mana mereka mulai membedakan antara negara dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dinilai sebagai anti tesis dari negara dan harus memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mengontrol negara.

Menurut Hegel dalam Kusumandaru (2004) *civil society* tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya kontrol yang jelas. Hegel kemudian memberi pembedaan antara masyarakat politik (*the state*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Hegel memaknai *civil society* sebagai masyarakat *borjuis*.

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Hegel, Alexis de Tocqueville dalam AS Culla (2012) berpendapat adanya legitimasi negara untuk mengontrol *civil society* akan menyebabkan timbulnya negara *despotik*. Aniq mengatakan:

Masyarakat sipil tidak secara *a priori* subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik (Aniq, 2008).

Pencarian mengenai konsepsi *civil society* sempat terhenti dalam waktu yang lama. Wacana *civil society* kembali mengemuka ketika terjadi gerakan perlawanan yang terjadi di Polandia di bawah pimpinan Lech Walesa yang melakukan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jendral Jeruzelski. Dalam perlawanannya kelompok gerakan tersebut memakai istilah *civil society* sebagai dasar gerakan perlawanan. Keberhasilan dari gerakan tersebut kembali memicu perbincangan mengenai *civil society* diberbagai negara termasuk negara-negara di Asia dan Afrika (Aniq, 2008).

Hendro Prasetyo (2000) istilah *civil society* pertama kali muncul di Indonesia pada abad 19 tepatnya pada tahun 1988 melalui konferensi yang diselenggarakan oleh Monash University Australia pada tanggal 25-27 November 1988 dengan tema “*State and Civil Society in Contemporary Indonesia*”.

Semenjak saat itu wacana mengenai *civil society* berkembang begitu cepat dikalangan intelektual Indonesia. Berbagai terjemahan dan pengertian *civil society* dikeluarkan oleh para intelektual Indonesia dengan argumen dan pandangannya masing-masing. Salah satu istilah atau penerjemahan dari *civil society* yang paling populer dan diterima oleh masyarakat Indonesia adalah “masyarakat madani”.

Menurut Gemmil dan Rosyada (2011), *civil society* didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan, antarlain: kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaa, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatandengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Gemmil dan Rosyada (2011), sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan-kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas sebagai tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga setempat. Habermas dan Gemmil dan Rosyada (2011) melihat *civil society* sebagai jaringan pengelompokkan dan asosiasi yang mencakup mulai dari keluarga, organisasi sukarela, sampai pada organisasi yang mungkin di bawah bentukan negara tetapi berperan sebagai perantara antara negara dan individu, pribadi dan publik.

Menurut Gemmil dan Rosyada (2011), *civil society* itu bukan satu-satunya yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan dengan kata lain, *civil society* adalah salah satu bagian tatanan politik secara keseluruhan, di mana bagian dari tatanan politik yang lain adalah suatu negara. Menurut Gemmil dan Rosyada (2011), *civil society* merupakan kekuatan positif di luar kekuatan negara, partai politik dan bisnis yang bisa menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat bahwa negara bukan pusat dari segalanya dalam kehidupan. Sedangkan Nurcholish Madjid dalam Azra (2013) menjelaskan bahwa *civil society* adalah rumah di mana berbagai asosiasi, perkumpulan, serikat kerja, federasi dan partai politik akan menjadi perisai atau pelindung antara masyarakat dan negara.

Definisi lain menurut Gemmil dan Rosyada (2011), *civil society* adalah suatu ruang di mana peranan masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering disebut juga organisasi massa di Indonesia. Selanjutnya menurut Sumarto (2013) *civil society* adalah tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi Organisasi Non-pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta. Dari pengertian *civil society* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *civil society* adalah wilayah atau ruang bagi berbagai

organisasi/asosiasi yang terorganisir dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara sebagai ruang publik yang bebas. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah perwujudan kelembagaan dari *civil society*.

## 2. Karakteristik Masyarakat Sipil (*Civil society*)

Prasetyo (2012) menyebutkan bahwa jika negara bercirikan monopoli dan penggunaan alat paksaan sedangkan sektor swasta bercirikan mekanisme kerjanya berdasarkan mekanisme pasar untuk memperoleh laba maka *civil society* bercirikan kerelaan, nirlaba dan tanpa paksaan, *civil society* berpijak pada prinsip bahwa masyarakat pasar dan Negara adalah bagian yang harus saling mendukung dan mengawasi. Artinya masyarakat memenuhi kewajibannya untuk taat kepada negara dengan membayar pajak dan lain-lain, demikian halnya negara juga harus memenuhi kewajibannya dalam melayani masyarakat. Apabila terjadi ketimpangan dari salah satunya maka praktek *governance* tidak akan terwujud.

Selain itu, menurut Gemmil dan Rosyada (2011) *civil society* dibagi menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

- a. *Identity based civil society*, yaitu *civil society* yang basisnya adalah identitas, penekanan pada suatu identitas yang sifatnya partikular.
- b. *Interest based civil society*, yaitu *civil society* yang basis sosialnya adalah kepentingan, tipe ini merupakan bagian yang integral dari perubahan masyarakat urban.

Gemmill dan Bamidele-Izu (2015) mengeksplorasi potensi peran yang diperkuat untuk *civil society*, dan terutama organisasi non-negara, dalam

yang baru atau sistem pemerintahan lingkungan global yang direstrukturisasi. Mereka berdebat bahwa *civil society* harus memainkan peran utama dalam lima bidang utama:

a. Pengumpulan dan penyebaran informasi

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah informasi didapatkan maka informasi tersebut disebarakan ke publik. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat (Susanto, 2004).

b. Konsultasi pengembangan kebijakan

Dilibatkan dalam proses-proses partisipatif, mulai dari tahap perencanaandan perancangan kebijakan, substansi dan implementasi. Pengawasan dan pengkajian suatu kebijakan juga perlu diperhitungkan dalam bentuk forum-forum dialog ataupun konsultasi antar pemangku kepentingan (diakses dari <https://programsetapak.org/pengembangan-kebijakan/> pada tanggal 20 Juli 2019)

c. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Agustino, 2008).

d. Advokasi untuk keadilan lingkungan

Menurut Hopkins dalam Setyowati (1990), advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Advokasi bekerja untuk mempengaruhi

kebijakan publik di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya untuk mewujudkan keadilan dan perubahan positif dalam isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan. Menurut Danusaputro (1985), lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.

Lebih lanjut mereka berpendapat bahwa struktur yang ada tidak memungkinkan *civil society* untuk memenuhi peran-peran ini secara efektif dan menawarkan saran untuk reformasi langkah-langkah untuk memfasilitasi partisipasi *civil society* dalam pemerintahan lingkungan global (*global environmental governance*).

Berdasarkan uraian di atas, maka masyarakat yang berperadaban karena tunduk dan patuh kepada ajaran kepatuhan yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Ia pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara.

### **3. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat**

*Non-Government Organization* (NGO) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti organisasi non pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Rahardjo dalam Nawawi (2011) adalah organisasi

non pemerintah yang memiliki ciri aktifitas mengangkat penduduk termiskin, mendorong partisipasi yang lebih luas, tidak birokratis dan membutuhkan biaya yang murah serta banyak melakukan eksperimen di masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas mengenai LSM dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan media atau wadah untuk memungkinkan partisipasi masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan. Artinya masyarakat dijadikan subjek dalam proses pembangunan yakni sebagai perencana, pelaksanaan, pengawas maupun sebagai kontrol terhadap jalannya proses pembangunan baik pembangunan secara fisik maupun secara mental dalam upaya mencapai tujuan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

#### **4. Ciri-Ciri Lembaga Swadaya Masyarakat**

Menurut Rahardjo dalam Nawawi (2011) ciri-ciri lembaga swadaya masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bekerja sama merupakan suatu kesamaan aspirasi dan kegiatan di mana hubungan-hubungan itu dapat saling berkomunikasi dengan masyarakat bawah.
- b. Untuk mencapai tujuan berkerja bersama dengan prinsip saling membantu berdasarkan kepentingan bersama dengan substansi masalah kebutuhan dasar.
- c. Kelompok ini dikenal dengan istilah *Self Help Group*, dengan karakteristik kelompok ini terorganisir dengan baik, informal, penuh dengan kreatifitas, berada di pedesaan atau di perkotaan.
- d. Organisasi ini bergerak pada tingkat *Grassroots*

- e. Organisasi ini sering terlibat dalam kegiatan pembangunan yang sering kali belum dilakukan pemerintah atau pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukannya
- f. Dibantu oleh tenaga sukarela dan fokus kegiatannya pada upaya peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Rahardjo (2013) membicarakan LSM yang bergerak dalam berbagai corak kegiatan. Menurutnya, terlepas dari hubungannya dengan negara, ada tiga corak aktivitas dari LSM yaitu pertama, memajukan kesejahteraan sehingga sifatnya sebenarnya pemberi pertolongan kepada masyarakat yang rentan. Kedua, bercorak *developmental*, yang lebih mempunyai keinginan memperkenalkan semacam perubahan struktural. Ketiga, bercorak advokasi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan kesimpulan bahwa di Indonesia terutama pemberdayaan *civil society* adalah LSM di Indonesia cukup banyak jumlahnya dengan penyebaran yang luas dan variasi program serta proyek yang berbeda-beda sehingga memungkinkan mereka mencapai daerah-daerah yang bermacam-macam coraknya dan terpencil lokasinya. Banyak LSM yang berperan aktif bagi rakyat marginal yang suaranya hampir tidak pernah didengar, sehingga menjadi semacam substitusi bagi institusi politik yang ada.

## **5. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat**

Menurut Hikam (2013) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peran yang sangat penting terhadap pemberdayaan dan pengembangan

potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh rakyat dan menjadi kontrol terhadap jalannya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran ini diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

Secara ideal dapat dikatakan bahwa salah satu kelebihan LSM dibandingkan dengan pihak lain adalah kedekatannya dengan masyarakat. Menurut Ismawan (2000), dalam membantu masyarakat miskin, ada empat pendekatan yang dipakai oleh LSM. Keempat pendekatan itu didasarkan pada persepsi mereka mengenai keberadaan masyarakat miskin, yakni:

- a. Pendekatan sosio-karitatif, yakni suatu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, menderita, dan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sejumlah LSM, khususnya yang berlatar belakang keagamaan, menggunakan pendekatan ini dengan, misalnya, mendirikan panti jompo, rumah yatim piatu, membuat program beasiswa.
- b. Pendekatan sosio-reformis. Pendekatan ini dilakukan secara aksidental, dengan maksud mengembalikan keadaan menjadi normal kembali. Bentuk kegiatannya antara lain seperti karya kesehatan,

menolong persoalan pribadi (antara lain masalah ketergantungan pada narkoba), penanggulangan bencana alam, dan kelaparan.

- c. Pendekatan sosio-ekonomis, yakni suatu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa orang miskin mempunyai potensi untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi mereka sendiri. Kalau potensi itu diperkuat, maka mereka akan menjadi mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini belakangan disebut pemberdayaan.
- d. Pendekatan sosio-transformis. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan perubahan sikap, tingkah laku, pandangan, dan budaya masyarakat. Upaya dilakukan dengan cara memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan partisipatif.

Berbagai pendekatan tersebut telah menggambarkan peranan LSM dalam pembangunan nasional. Hampir semua bidang kehidupan rakyat kecil yang ditangani oleh departemen-departemen pemerintah merupakan bidang garapan LSM (dalam skala kecil). Berikut beberapa contoh:

- a. Bidang pertanian. LSM menyelenggarakan proyek-proyek yang mendorong kemandirian masyarakat, seperti proyek tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Secara spesifik, proyek-proyek itu mengembangkan pertanian lahan kering, Tambak Inti Rakyat, Perkebunan Inti Rakyat, mengelola berbagai pusat latihan pertanian, dan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok swadaya petani.

- b. Bidang kesehatan. LSM memelopori program dana sehat serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang kemudian disebarluaskan oleh pemerintah. Demikian juga dengan Program Keluarga Berencana (KB), dirintis oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan selanjutnya dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di banyak tempat, LSM juga mengupayakan tersedianya air bersih untuk minum dan program kesehatan masyarakat.
- c. Bidang keuangan. LSM menumbuhkan KSM yang mempunyai kegiatan di bidang pemupukan modal, dengan menyelenggarakan tabungan dan kredit. Mereka kemudian dihubungkan dengan bank, sehingga timbul Program Hubungan Bank dan KSM (PHBK). Sementara itu CUCO (*Credit Union Counseling Office*) telah menumbuh kembangkan ribuan koperasi kredit dengan total aset puluhan milyar rupiah.
- d. Bidang pendidikan. LSM menyelenggarakan program pelatihan untuk tenaga pendamping dan pengelola kegiatan yang mengembangkan kemandirian masyarakat. Selain itu, banyak juga LSM yang menyelenggarakan pendidikan non-formal di berbagai bidang serta melakukan pembinaan usaha kecil.
- e. Bidang lingkungan hidup. LSM mengupayakan kesadaran masyarakat dan mendorong kepeloporan untuk melestarikan lingkungan hidup. LSM juga memperjuangkan dilaksanakannya undang-undang

lingkungan hidup dalam dunia industri, seperti masalah pengolahan limbah.

Menurut Hikam (2013), sesuai dengan karakteristiknya, lembaga masyarakat nirlaba pada umumnya membawa misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di luar negara dan sektor swasta, yang merupakan substansi gagasan dan praksis hidup masyarakat sipil. Lebih lanjut Hikam (2013) menambahkan peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting dalam pemberdayaan yakni karena kemampuan LSM dalam memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Peranan penting selanjutnya adalah menyebarluaskan program-program untuk meningkatkan kesadaran berpolitik maupun memberikan pembelaan kepada rakyat untuk berjuang demi hak-hak dasarnya.

Selanjutnya Prasetyo, dkk (2002) juga menyebutkan bahwa LSM sangat menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Adapun tema pemberdayaan yang dimaksud seperti pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centered development*), pengembangan kelembagaan (*institution development*), kemandirian (*self-reliance*) dan berkesinambungan (*sustainability*). Sedangkan menurut Azra (2013), LSM merupakan elemen *civil society* yang memegang peranan signifikan dalam *political opportunities* untuk memerantarai persoalan-persoalan publik dengan negara. LSM dengan negara dalam kerangka memediasi kepentingan warga didasari atas tiga paradigma yaitu:

- a. Bersifat komplementer dengan maksud memajukan kesejahteraan melalui beragam aktifitas yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik (*public service*).
- b. Bersifat substitutif, artinya kalangan LSM melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas.
- c. Sebagai kekuatan tandingan negara atau *counter balancing the state* atau *counterveiling forces* yakni dengan melakukan advokasi, pendampingan, litigasi, bahkan praktik-praktik oposisional untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di luar wacana dominan negara. Tugas lembaga swadaya masyarakat adalah menjalankan dan mengawasi proses kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Lembaga swadaya masyarakat merupakan kesatuan manusia yang telah diatur secara sistematis dalam usaha mencapai tujuan tertentu, dalam setiap unit setiap anggota telah mempunyai tugas yang mana telah ditentukan terlebih dahulu secara resmi.

Bentuk organisasi atau lembaga sosial selalu mempunyai tujuan yang spesifik tertentu. Di samping sebagai pendamping fasilitator baik ruang maupun tempat, LSM juga dapat melakukan diskusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan tentunya diharapkan timbulnya suatu kesadaran kritis dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan dilakukannya penguatan-penguatan bagi masyarakat tersebut sehingga diharapkan masyarakat bisa memiliki peran dalam menentukan

dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Peranan LSM tersebut sangat penting dalam mewujudkan:

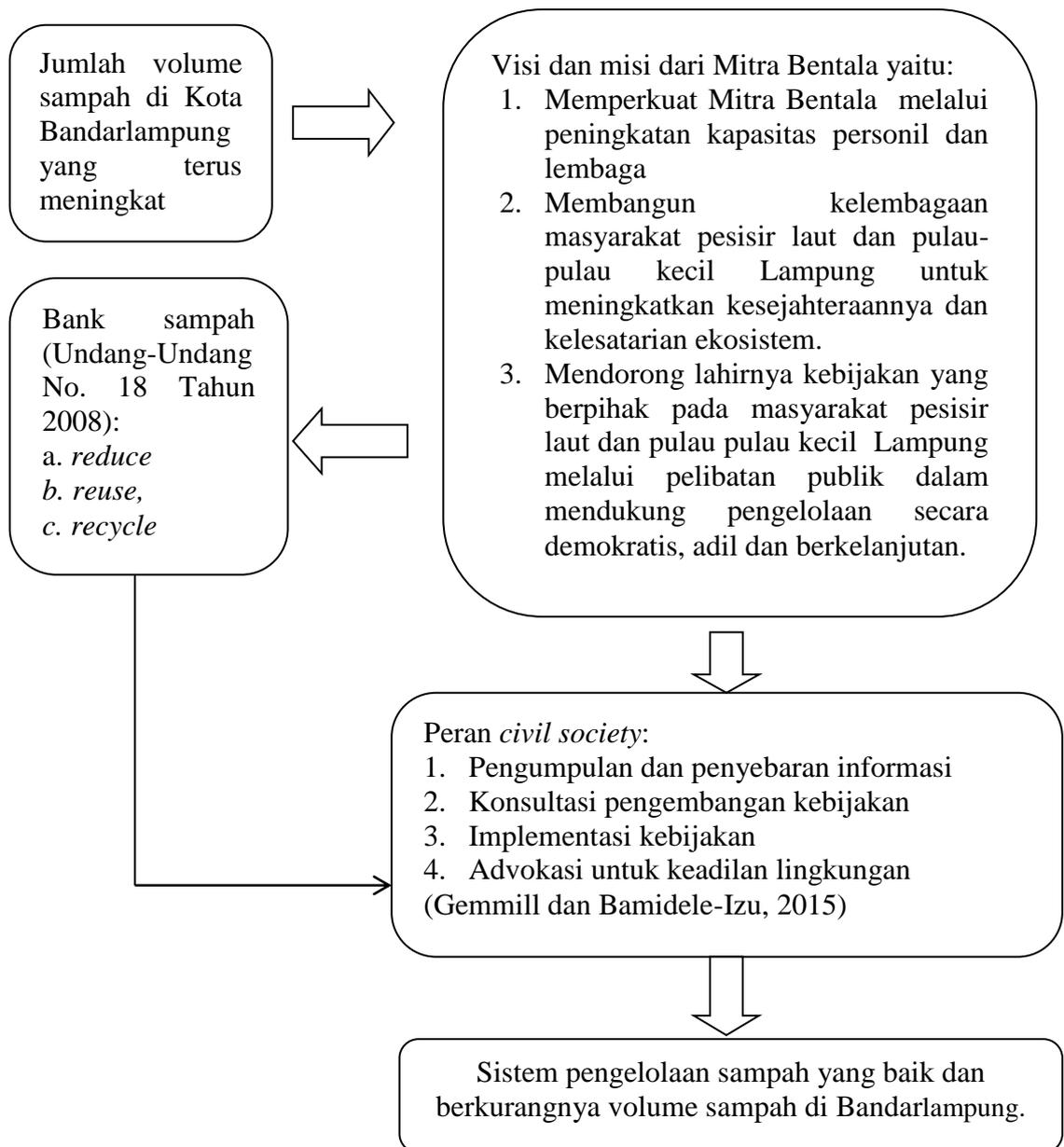
- a. Terjadinya demokrasi pembangunan.
- b. Terjadinya kontrol terhadap proses pembangunan.
- c. Adanya alternatif-alternatif pembangunan di luar model pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi sosial sangat berarti dan dibutuhkan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang mencita-citakan terwujudnya demokrasi pembangunan. Peneliti menggunakan peran LSM menurut Rahardjo karena dalam peranan tersebut mencakup peranan LSM secara keseluruhan tidak hanya kepada masyarakat melainkan juga peranannya bersama dengan pemerintah.

#### **E. Kerangka Pikir**

Meningkatnya volume sampah di Bandarlampung secara signifikan dan terbilang sangat besar, maka perlu adanya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien agar timbunan sampah yang ada di TPS-TPS di Bandarlampung tidak semakin menumpuk setiap harinya. Melihat kondisi tersebut masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup terutama Mitra Bentala mengambil peran dalam membuat sebuah program di Bandarlampung yaitu Bank Sampah. Bank Sampah seperti yang dikenal sebutannya di Indonesia merupakan sebuah konsep pengelolaan sampah yang meyakinkan, sebagai program strategis yang baru.

Pengelolaan sampah dengan dampak positif melalui program pengembangan Bank Sampah tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Bank Sampah pada umumnya dibentuk dilingkungan penghuni 1000 orang dan biasanya dijalankan oleh warga kurang mampu yang ingin meningkatkan pendapatannya. Adapun kerangka berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah oleh peneliti*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan penjelasan dan kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula apa yang melatar belakangi mereka berperilaku (berfikir, berperasaan dan bertindak) seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kepada informan atau teman sejawat). Berkaitan dengan tujuan penelitian, peneliti mendeskripsikan peran *civil society* dalam pengelolaan sampah.

#### **B. Lokasi dan Fokus Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di LSM Mitra Bentala dan Kelurahan Kota Karang Teluk Betung Bandarlampung.

##### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Oleh karena

itu fokus penelitian yang diambil penulis adalah peran *civil society* menurut Gemmil (2011) dalam menangani dan mengelola sampah yang berada di Kota Bandarlampung yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan dan penyebaran informasi
- b. Konsultasi pengembangan kebijakan
- c. Implementasi kebijakan
- d. Advokasi untuk keadilan lingkungan

### C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.

#### a. Data Primer

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Mashabi	Direktur Eksekutif Mitra Bentala
2	Anisar	Kepala Seksi Teknologi dan Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung
3	Nuraini	Ketua Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang
4	Syamsudin	Ketua RT 07 Kelurahan Kota Karang
5	Mastuah	Masyarakat Kelurahan Kota Karang

*Sumber: Diolah oleh peneliti*

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh selama penelitian adalah data berupa naskah, dokumen resmi, arsip yang dimiliki LSM Mitra Bentala.

**D. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai peran *civil society* dalam pengelolaan sampah pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kota Bandarlampung

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan langsung dalam kegiatan program Bank Sampah di Kota Bandarlampung pada LSM Mitra Bentala.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia seperti data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian yaitu program Bank Sampah di Kota Bandarlampung pada LSM Mitra Bentala dan Kelurahan Kota Karang Teluk Betung Bandarlampung.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci.

#### **b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

### **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan, dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## 1. Kredibilitas

Validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variabel yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa yang seharusnya diukur maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil penelitiannya juga tidak dapat dipercaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat validitas.

Menurut Moleong (2017), validitas internal (kredibilitas) dapat dilakukan dengan: memperpanjang masa observasi, melakukan pengamatan terus menerus, triangulasi data, membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*.

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa observasi, memperpanjang masa observasi dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data. Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan seperti bohong, menipu, dan berpura-pura oleh subyek, informan, key informan. Unsur kesengajaan dapat berupa kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, motivasi, hanya untuk menyenangkan atau menyedihkan peneliti dalam peran *civil society* dalam pengelolaan sampah pada program Bank Sampah di Kota Bandarlampung pada LSM Mitra Bentala.

- b. Pengamatan terus menerus, dengan pengamatan terus menerus dan kontinyu, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, terinci dan mendalam. Pengamatan yang terus menerus, akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha pemerolehan data. Pengamatan secara terus menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan pada penelitian mengenai peran *civil society* dalam pengelolaan sampah.
- c. Triangulasi data, tujuan triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*.

Triangulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi

lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan dari hasil penelitian mengenai peran *civil society* dalam pengelolaan sampah pada program Bank Sampah di Kota Bandarlampung pada LSM Mitra Bentala.

## 2. Transferabilitas

Validitas eksternal berkenaan dengan masalah generalisasi, yakni sampai di manakah generalisasi yang dirumuskan juga berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisir, karena dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan sampling acak, atau senantiasa bersifat *purposive sampling* dalam penelitian mengenai peran *civil society* dalam pengelolaan sampah pada program Bank Sampah di Kota Bandarlampung pada LSM Mitra Bentala.

## 3. Dependabilitas

Dependabilitas atau reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan teknik ulang atau *check rechecks* dalam penelitian mengenai peran *civil society* dalam pengelolaan sampah pada program Bank Sampah di Kota Bandarlampung pada LSM Mitra Bentala.

#### 4. Objektivitas

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha sedapat mungkin memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila dibenarkan atau *diconfirm* oleh peneliti lain dalam penelitian mengenai peran *civil society* dalam pengelolaan sampah pada program Bank Sampah di Kota Bandarlampung pada LSM Mitra Bentala.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Peran LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung dalam pengelolaan sampah termasuk baik,

1. LSM Mitra Bentala telah melakukan LSM Mitra Bentala telah melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi tentang lingkungan terutama mengenai program Bank Sampah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Bandarlampung telah dilakukan secara maksimal.
2. LSM Mitra Bentala telah melakukan secara maksimal konsultasi pengembangan kebijakan lingkungan berupa bank sampah ini telah dilakukan oleh berbagai pihak khususnya dari pemerintah kota melalui UPT TPA Bakung dan LSM Mitra Bentala selaku lembaga di luar pemerintahan dengan cara melakukan diskusi dan hasil diskusi tersebut dilaksanakan dalam program bank sampah.
3. Implementasi kebijakan yang dilakukan LSM Mitra Bentala dengan NGO bidang lingkungan lainnya merupakan salah satu bentuk kerjasama antar LSM. Setelah mendapatkan banyak informasi dan bukti maka LSM Mitra Bentala akan menghubungi pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung untuk mendorong adanya kebijakan terkait revitalisasi tersebut.

4. Advokasi untuk keadilan lingkungan cukup baik, dimana Advokasi lingkungan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengadukan permasalahan lingkungan di sekitarnya yang memang sudah tercemar. Partisipasi *civil society* membutuhkan komitmen waktu yang signifikan serta keuangan yang besar sumber daya dari pemerintah dan badan antar pemerintah

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penelitian memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk LSM Mitra Bentala dalam meningkatkan peran sebagai aktor non-negara dan ruang publik di Kota Bandar Lampung pada tahun-tahun selanjutnya. Saran-saran yang dimaksud meliputi:

1. Disarankan LSM Mitra Bentala membuat peta kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan di Kota Bandar Lampung sebagai dasar untuk melakukan penilaian dan pemantauan kondisi lingkungan secara intensif.
2. Disarankan LSM Mitra Bentala dapat membuat klasifikasi tema permasalahan lingkungan untuk melihat permasalahan mana yang paling parah dampak kerusakan lingkungan untuk dijadikan prioritas bagi LSM Mitra Bentala. Selain itu LSM Mitra Bentala dapat membuat form pengaduan masyarakat seperti yang sudah dicanangkan sebelumnya namun belum terlaksana dengan baik.
3. Disarankan kepada pemerintah Kota Bandarlampung dan LSM Mitra Bentala untuk lebih maksimal dalam mensosialisasikan program Bank Sampah yang selama ini hanya terfokus pada 3 tempat yaitu Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Panjang dan Kelurahan Batu Putu, sehingga masyarakat akan lebih

mengetahui mengenai bank sampah dan akan lebih peduli dengan kondisi lingkungan hidup dengan cara memilah-milah sampah yang dapat didaur ulang menjadi bahan yang dapat berguna dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Bandarlampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Aprillia, Therisia dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabet.
- AS Culla, 2012, *Rekonstruksi Civil Society; Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Astuti D, Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hikam, Muhammad.2013. *Demokrasi dan Civil Society*.Jakarta:Pustaka.
- Lalolo, Loina. 2013. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas.
- Mahmudi. 2011, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putri, Nabila. 2016. *Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Rosyada, Dede, dkk. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Azazi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Medika.
- Sedarmayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani. 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Sumber Jurnal dan Skripsi

- Gemmill, Barbara, dan Bamidele-Izu, Abimbola. 2002. *The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance* (<https://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/ag/gemmill.pdf>)
- Novianty, Mita. 2013. *Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan*. Medan : Universitas Sumatera Utara, Vol. 2 No. 4. Diakses pada <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/article/view/6231/2644>
- Saputra, Pindo Rizki. 2017. *Partisipasi Civil society dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia Asal Lampung*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Sujiatmi, 2017, *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government*. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
- Suryani, Anih Sri. 2014. *Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*. Vol. 5 No. 1. Diakses pada <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447>

## Sumber Website

- <http://www.simpuldemokrasi.com/dinamika-demokrasi/wacana-demokrasi/1309--civil-society-dan-demokrasi-di-Indonesia.html> diakses pada 10 Desember 2018 pukul 10:30 WIB
- <http://temesirecycling.com/id/bank-sampah/> diakses pada 10 Desember 2018 pukul 09:45 WIB
- [https://www.teraslampung.com/mitra-bentala-luncurkan-bank-sampah-di-kota-Bandar Lampung/](https://www.teraslampung.com/mitra-bentala-luncurkan-bank-sampah-di-kota-Bandar-Lampung/)
- <http://jdih.Bandar Lampungkota.go.id/wp-content/uploads/2018/01/Perda-Nomor-5-Tahun-2015.pdf>